

DAFTAR PUSATAKA

A. BUKU

Diana Napitupulu, 2010. *KPK in Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Eko Handoyo, 2009. *Pendidikan Korupsi*. Semarang: Ombak

Jimly Asshiddiqie, 2005. *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)

Encik Muhammad Fauzan, 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press

Jimly Asshiddiqie, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo

Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Konstitusi Press
Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Perss

Titik Triwulan Tutik, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher

Linjte Anna Marpaung, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Andi

Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yoyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Kasil dkk, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta

Mahmud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers

Monang Siahaan, 2014, Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Penuh Onak Duri, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo

Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika

Romli Librayanto, 2008, Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makasar, PuKAP-Indonesia

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 2006, Teori Dan Hukum Konstitusi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Adnan Buyung Nasution, 2007, Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Jakarta, Kata Hasta Pustaka

Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, 2014, Memahami Konstitusi Makna Dan Aktualisasi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Bandung, Nusamedia dan Penerbit Nuansa

Jimly Asshiddiqie, 2012, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Soehino, 2005, Ilmu Negara, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta

Kansil dan Christine, 2011, Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara, Jakarta, Rineka Cipta

Jimly Asshiddiqie, 2017, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Moh Kusnardi dan Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Rancangan Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Risalah rapat paripurna ke-20 Masa Sidang II Tahun Sidang 2002-2003 Proses Pembahasan RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait Hak Angket DPR

C. Internet, Majalah, dll

<https://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca-amandemen/> (diambil pada tanggal 25.11.2018 pada pukul 22.27 WIB)